

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan sebagai konsep penelitian, dan generalisasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai landasan teori berupa premis untuk data konfirmasi penelitian yang mengkaji Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, *Good Governance* dan Kinerja Pemerintah Daerah.

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:43), yaitu:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah 10 (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi).”

Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Erlina, Omar Sakti rambe, Rasdianto (2015:6), yaitu:

“Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).”

Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Dearah menurut Abdul Halim (2007:42), yaitu:

“Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta

pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.”

Berdasarkan Teori di atas yang di kemukakan oleh para ahli disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta laporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja. Yang diperuntukan untuk pihak berkepentingan seperti instansi terkait, untuk mengetahui posisi dari laporan keuangan pada instansi pemerintah.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Nurlan Darise (2008:28) tujuan system akuntansi keuangan daerah adalah:

1. Pertanggungjawaban Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.
2. Manajerial Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.1.1.3 Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2004:15) ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pengurusan Umum adalah APBD
2. Pengurusan Khusus oleh bendaharawan umum dan khusus.

2.1.1.4 Tahapan Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul halim (2007:15) tahapan-tahapan penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah, meliputi:

1. Perencanaan meliputi berbagai kegiatan untuk mengidentifikasi permasalahan serta tujuan pengembangan akuntansi.
2. Pemilihan Sistem, meliputi kegiatan studi kelayakan dari berbagai aspek atas berbagai sistem yang dapat digunakan untuk dipilih sistem yang tepat bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.
3. Pengembangan Sistem, meliputi kegiatan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi (berikut *software*), pengadaan *hardware* dan prasarana penunjang lainnya, penyiapan kelembagaan yang bertanggung jawab atas sistem akuntansi, penyiapan modul pelatihan, dan penyiapan SDM yang kompeten di bidang akuntansi.

4. Implementasi Sistem, yaitu mengimplementasikan sistem yang telah dikembangkan. Dalam tahap implementasi ini hendaknya digunakan sistem paralel. Sistem keuangan daerah yang sekarang tetap berjalan sementara sistem akuntansi keuangan yang baru mulai dijalankan. Bila sistem yang baru berjalan lancar, maka sistem yang lama ditinggalkan.

5. Pemeliharaan Sistem, dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kelemahan yang ada serta untuk memutakhirkan agar sistem dapat selalu memenuhi kebutuhan. Pemeliharaan sistem ini harus dilaksanakan secara terus-menerus mengingat perubahan peraturan perundang-undangan, operasi dan transaksi keuangan pemerintah sedemikian sering terjadi.

2.1.1.5 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Deddi Nordiawan (2010:201), Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa komponen sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1. Pencatatan
 - a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
 - b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
 - c. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
2. Pengikhtisaran
 - a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.

- b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.
 - c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
 - d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
 - e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
 - f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
3. Pelaporan
Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

2.1.2 *Good Governance*

2.1.2.1 *Pengertian Good Governance*

Good Governance menurut Abdidarin Rosidi dan Rinatania Fajriani (2013:4), yaitu:

“*Good Governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yaitu pemerintahan, rakyat atau civil society dan usahawan yang berada disektor swasta”.

Pengertian *Good Governance* Menurut Hendra Karianga (2017:40), yaitu:

“*Good Governace* Sektor Publik Diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan *stakeholder* terhadap berbagai macam kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi dan transparansi”.

Menurut Sri Mulyani dkk (2017:194) *good governance* merupakan kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintah dalam suatu negara.

Berdasarkan teori di atas yang di kemukakan oleh parah ahli disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan *stakeholder* terhadap berbagai macam kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi dan transparansi.

2.1.2.2 Tujuan *Good Governance*

Tujuan Good Governance menurut Agung Kurniawan (2005 : 12), sebagai berikut :

“Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat”.

Tata kelola pemerintah yang baik menghendaki pemerintah dijalankan dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sehingga sumber daya Negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan Negara. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan Negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara, karena aspek keuangan Negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa,

baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas (Sedarmayanti, 2012:2).

2.1.2.3 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut Mardiasmo (2009:18) terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu :

1. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga- lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *disclosure* yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat.

Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Partisipasi (*Participation*) Keterlibatan

masyarakat dalam mengambil keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009:18).

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:18) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

3. Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas (*Value for money*)

Menurut Mardiasmo (2009:18) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil

program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan output.

2.1.2.4 Indikator *Good Governance*

Donni Juni Priansa (2018:97) Menetapkan karakteristik prinsip *good governance*, yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi

Prinsip ini menyatakan bahwa pada dasarnya *good governance* membutuhkan partisipasi dari publik untuk penyelenggaraan pemerintahan. Disini pemerintah harus mampu memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

2. Supremasi Hukum

Hukum harus adil dan diberlakukan kepada siapa saja yang bersalah tanpa pandang bulu. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Tranparansi

Implementasi *good governance* membutuhkan adanya keterbukaan dari pemerintah untuk meberikan jaminan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat di informasikan kepada masyarakat.

4. Responsif

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan tuntutan dan kebutuhan publik merupakan dasar dari pelaksanaan program dan kebijakan yang responsif terhadap kepentingan publik.

5. Konsesus

Bila ada perbedaan kepentingan dalam kebijakan maupun prosedur. Konsensus merupakan salah satu cara untuk menyelesaikannya, dengan dilakukan musyawarah untuk mendapatkan pilihan yang terbaik.

6. Keadilan

Pemerintah harus dapat memberikan pelayanan yang sama bagi seluruh masyarakat dengan memperhatikan keadilan.

7. Efisien dan efektif

Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan dengan efektif dan efisien sehingga tidak memnghabiskan anggaran terlalu besar, tetapi dapat memberikan pelayanan yang optimal.

8. Tanggungjawab

Pemerintah memiliki tanggungjawab atas seluruh *stakeholder*-nya, sehingga seluruh kebijakan yang di buat harus berdasarkan dengan tuntutan *stakeholder*.

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah menurut Muhammad Fadel (2008:14), Kinerja Pemerintah Daerah Merupakan Kinerja Dari Organisasi Atau Instansi Pemerintah Daerah.

Menurut Ratu Wardarita (2017:9) pengertian Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai catatan dari hasil yang di capai pemerintah daerah dalam melakukan tugasnya dalam waktu tertentu

Menurut Mohammad Mahsun (2013:25), Kinerja Pemerintah Daerah adalah:

“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang termuat dalam *strategic planning* suatu organisasi.”

Berdasarkan Teori di atas yang di kemukakan oleh para ahli disimpulkan bahwa definisi kinerja pemerintah daerah adalah catatan dari hasil-hasil yang dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu tertentu.

2.1.3.2 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja pemerintah daerah menggunakan komponen yang dikemukakan oleh Indra Bastian (2005:267), yaitu sebagai berikut :

1. Masukan (*Input*)

Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Keluaran (*Output*)

Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.

3. Hasil (*Outcome*)

Sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

4. Manfaat (*Benefits*)

Sesuatu yang terkait dengan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5. Dampak (*Impacts*)

Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berbagai permasalahan yang muncul sebagai penyebab turunnya kinerja antara lain belum adanya fungsi manajemen pemerintah daerah seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi serta peran masyarakat yang masih lemah untuk membantu pemerintah daerah dalam akuntabel dan transparan, pemerintah juga belum banyak melakukan perubahan terhadap kinerja di berbagai daerah. Kinerja di tentukan baik buruknya dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah jika Sistem Akuntansi Keuangan daerahnya buruk berarti kinerjanya pun buruk namun jika sebaliknya Sistem Akuntansi Keuangan Daerahnya baik kinerja pemerintah daerahnya pun baik. Menurut Veithzal Rivai dan Ahmad Fawzi Mohamad Basri (2005:309), Kinerja pemerintah daerah sebagai perilaku nyata yang ditampilkan orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan peranannya.

Tetapi kinerja dan Sistem Akuntansi Keuangan daerah saat ini masih buruk dalam menerapkan system Akuntansi Keuangan daerah tersebut menyebabkan buruknya kinerja pemerintah daerah. Dengan menerapkan *Good Governance* mungkin saja Kinerja Pemerintah Daerah yang buruk bisa berubah menjadi baik namun jika pemerintah tidak menerapkan *Good Governance* maka kinerja pemerintah Daerah tetap buruk bahkan tidak mungkin menjadi baik dan masyarakat pun menjadi hilang kepercayaan terhadap pemerintah daerah yang semakin buruk. Maka, kerangka pemikiran pada penelitian ini akan menjelaskan adanya hubungan antara Sistem Akuntansi keuangan Daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dan hubungan *Good Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Mohamad Mahsun (2006:25) Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam strategic planning.

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja

Pemerintah Daerah

Daerah Kinerja Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dengan dukungan system akuntansi keuangan daerah dan penerapan yang baik tanpa adanya hambatan akan memperbaiki kinerja yang buruk atau tidak mencapai target yang diinginkan.

Pendapat di atas didukung oleh konsep yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:84) yang menyatakan Sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan

penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut .

Teori-teori tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu seperti menurut Vivid Annisa (2017), Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Yuliana Dwi Jayanti (2015), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Novita Lerly Djiloy (2016), Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

Berdasarkan referensi diatas maka dapat dirumuskan hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

2.2.2 Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

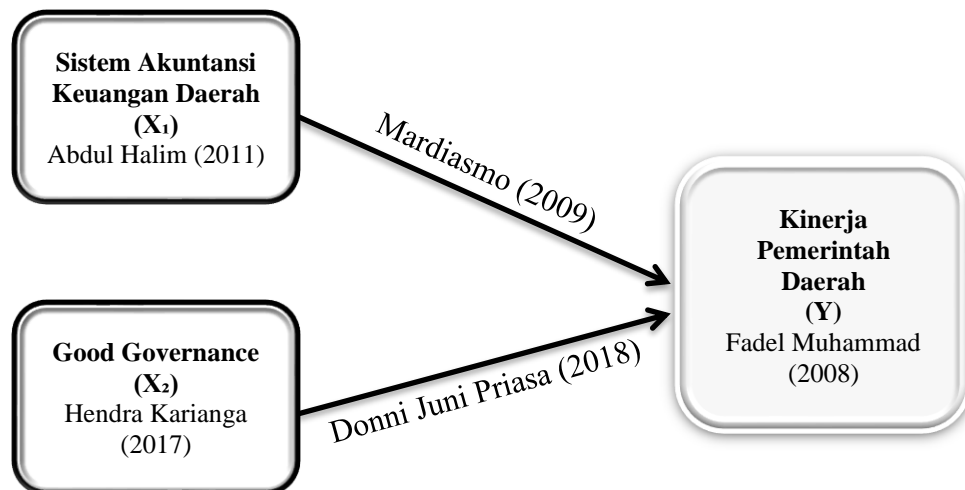
Good Governance dapat merubah kinerja pemerintah daerah jika menerapkannya dengan baik dan kebutuhan kinerja pemerintah daerah dengan menyusun program kegiatan yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sehingga masyarakat dapat menunjukkan dukungan terhadap kinerja pemerintah daerah

Pendapat tersebut di dukung oleh konsep yang di kemukakan Donni Juni Priasa (2018:92), Penerapan konsep *good governance* dalam pemerintah daerah akan memberikan manfaat berupa melancarkan proses pengambilan keputusan,

meningkatkan efisiensi dan terciptanya budaya kerja yang lebih sehat sehingga kinerja pemerintah daerah akan mengalami peningkatan.

Teori-teori tersebut di dukung oleh hasil penelitian terdahulu seperti menurut Vivid Annisa (2017), *Good Governance* berpengaruh dengan kinerja pemerintah daerah. Menurut Yuliana Dwi Jayanti (2015), *Good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Chici Claraini (2017), *Good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan refrensi diatas maka dapat dirumuskan hipotesis pertama pada penelitian ini adalah *good governance* berpengaruh terdapat kinerja pemerintah daerah.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan atau tuduhan bahwa sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu benar) sehingga harus diuji secara empiris (Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007:137).

Berdasarkan dari kerangka pemikiran diatas, maka peneliti perlu berasumsi mengambil keputusan sementara (Hipotesis) sebagai berikut:

H₁ : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H₂ : *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.